

NO	NAMA	N.I.M	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	Pembimbing	Kelayakan	Keterangan
1	Shinta Permata Sari Halim	2012-41-065	Penerapan Asas <i>Equality Before The Law</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor: 17/PID.B/TPK/2007/PN.JKT.PST., atas nama Terdakwa H. Agus Supriadi dan Perkara Nomor: 1/PID.B/TPK/2004/PN.JKT.PST., atas nama Terdakwa Ir. Abdullah Puteh)	1. Bagaimanakah penerapan Asas <i>Equality Before The Law</i> dalam suatu tindak pidana korupsi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?	Anatomi M.	Diterima	Cari Putusan Minimal Tahun 2009
				2. Bagaimanakah penerapan Asas <i>Equality Before The Law</i> dalam prakteknya terhadap tersangka atau terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi?			
				3. Bagaimana Asas <i>Equality Before The Law</i> diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili H. Agus Supriadi (Bupati Garut 2004-2009) dan Ir. Abdullah Puteh, M.Si. (gubernur Nanggroe Aceh Darussalam untuk periode tahun 2000-2005)			
2	Diega Ardysena	2009-41-137	Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penggantian Terpidana Oleh Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Seorang Advokat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/PID/2013)	1. Bagaimana penerapan pasal terhadap kasus penggantian terpidana oleh orang lain yang dilakukan seorang advokat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2035K/Pid/2011? 2. Apa yang menjadi faktor seorang Advokat dapat mengganti terpidana dengan orang lain?	Nugraha Abdulkadir	Diterima	Judul Skripsi Direvisi
3	Yayah Ginayah	2011-41-050	Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik di Badan Pertanahan nasional Kabupaten Tangerang	1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Tangerang? 2. Bagaimana cara masyarakat melakukan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Tangerang? 3. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Tangerang?		Ditolak	Judul dan Permasalahan Bersifat Umum
4	Laode Hamadi	2010-41-135	Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Suku Iha di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak	1. Bagaimana hubungan hukum kewarisan adat Iha dengan Upacara-upacara adat? 2. Kapan dan bagaimanakah cara pembagian warisan suku Iha tersebut?	Fokky Fuad	Diterima	

				3. Apakah akibat-akibat dan masalah-masalah yang timbul dalam pewarisan harta warisan suku Iha?			
5	Eka Ria Pratiwi	2011-41-117	1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Peninjauan Kembali Ditinjau dari Aspek Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013)	1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 sesuai dengan aspek Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan hukum?	Achmad Edi S.	Diterima	
				2. Bagaimana akibat hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013?			
			2. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2975 K/Pdt/2009 Tentang Kasus Susu Formula Bayi Berbakteri Ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen	1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat pasca tidak terlaksananya putusan Mahkamah Agung No 2975 K/Pdt/2009 oleh IPB, BPOM, dan Departemen Kesehatan?		-	
				2. Bagaimana keterkaitan antara informasi mengenai daftar merk susu formula bayi berbakteri yang beredar di pasaran dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?			
6	Artisah S.	2011-41-106	1. Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pekerja Dalam Masa Perjanjian Ikatan Dinas Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Nomor Perkara: 331/PDT.G/2011/PN.JKT.PST)	1. Bagaimana penerapan perjanjian ikatan dinas ditinjau dari Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?	Agus Suprayogi	Diterima	
				2. Bagaimana penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ikatan dinas (Studi Kasus Nomor Perkara: 331/PDT.G/2011/PN.JKT.PST)?			
			2. Analisis Terhadap Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang Diperoleh Dari Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Perkara Nomor: 309/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst)	1. Bagaimana analisis berdasarkan Pasal 378 KUHP terhadap studi kasus perkara nomor 309/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst?		-	
				2. Bagaimana penerapan hukum kepada masyarakat untuk mengatasi tindak pidana penipuan yang tertulis dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?			
			3. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Bisnis Investasi Tidak Langsung (Studi Kasus Perkara Nomor: 179/PDT.G/2011/PN.JKT.PST)	1. Apa yang termasuk sebagai bentuk-bentuk kejahatan investasi tidak langsung?		-	
				2. Bagaimana upaya hukum terhadap adanya tindak pidana penipuan dalam bisnis investasi?			

7	Zehlia Triastha	2011-41-002	1. Tata Cara Pendaftaran Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang)	1. Bagaimana mekanisme pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Tangerang?		Ditolak	Judul Bersifat Umum
				2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena di Kantor Pertanahan Kota Tangerang?			
			2. Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan (Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Pewarisan dihubungkan dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Juncto PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah)	1. Apakah ahli waris yang memperoleh hak milik atas tanah karena pewarisan harus mendaftarkan peralihan haknya tersebut menurut ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997?	Zulfikar Judge	Diterima	
				2. Bagaimanakah kekuatan sertifikat bagi pemegang hak atas tanah menurut UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997?			
8	Elyanshia Ishatinaya Amalo	2011-41-022	1. Tinjauan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Diberhentikan Sebelum Masa Kontrak Berakhir Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	1. Dalam kondisi atau keadaan apa perusahaan dapat memberhentikan pekerja sebelum masa kontrak berakhir? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?		Ditolak	Judul Bersifat Umum
				2. Apa saja ganti rugi yang seharusnya diberikan perusahaan ketika perusahaan memberhentikan pekerja sebelum masa kontraknya berakhir, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?			

			2. Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Membeli Sertifikat Palsu Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	1. Apa perlindungan hukum yang didapat oleh orang yang membeli sertifikat palsu ketika si pembeli sertifikat asli datang menuntut menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960?	Fauzie Kamal	Diterima	Harus Didukung Kasus
				2. Siapakah pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian si pemilik dalam membeli sertifikat palsu?			
9	Nurul Azizah	2011-41-088	1. Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Sebagai Jaminan Fasilitas Kredit Online	1. Bagaimanakah pengaturan hipotik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?	Nurhayati	Diterima	Harus Didukung Kasus
				2. Bagaimana tinjauan hukum secara umum mengenai hipotik sebagai penjaminan atau pembebanan atas pesawat udara?			
			2. Pertanggungjawaban dan Peranan Pengangkut Dalam Kargo Terhadap PT. Pos Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan	1. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap klaim hilangnya kargo barang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan?		-	
				2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh customer penerbangan atas kerugian dan kehilangan barang pada kargo PT. Pos Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan?			
10	Ar Ruum Pricellia Putri	2011-41-049	1. Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dalam Hukum Perdata Tentang Penahanan Ijazah Asli Pada Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	1. Apakah penahanan ijazah asli karyawan pada perusahaan sesuai dengan hukum?	Dhoni Yusra	Diterima	
				2. Bagaimana perlindungan hukum bagi karyawan dalam perspektif perdata di Indonesia?			
			2. Tinjauan Umum dan Hukum Positif Serta Penegakan Hukum di Pasar Modal (Studi Kasus Transaksi Saham PT. Sugi Samapersada Tbk. Dan PT. Arona Binasejati Tbk.)	1. Bagaimana tinjauan hukum serta hukum positif dalam kasus transaksi saham PT Sugi Samapersada Tbk. Dan PT Arona Binasejati Tbk.?		-	
				2. Apakah yang dilakukan bagi penegakan hukum dalam kasus transaksi saham PT Sugi Samapersada Tbk. Dan PT Arona Binasejati Tbk.?			

11	Angga Abiyana	2011-41-009	1. Analisis Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Dilakukan Secara Terus-menerus Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan No. 588 K/Pdt.Sus/2009)	1. Bagaimana seharusnya perpanjangan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu dilakukan?			
				2. Bagaimana peranan serta kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan perpanjangan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu?			
			2. Analisis Peranan Serta Batas Kewenangan Dewan Pengupahan Terkait Penetapan Upah Minimum Provinsi yang Dilakukan Secara Konkrit dan Sepihak oleh Gubernur Banten (Studi Kasus Putusan Nomor: 11/G/2012/PTUN-SRG)		Sri Redjeki S.	Diterima	Masukkan Permasalahan
12	Lukas Arta Kusuma	2011-41-013	1. Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Gugurnya Hak Asuh Anak Karena <i>Verstek</i> (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 142 PK/Pdt/2009)	1. Apakah tepat menentukan hak perwalian bagi seorang anak akibat dari perceraian orang tuanya?	Suartini	Diterima	Permasalahan harus lebih spesifik
				2. Bagaimanakah dalam prakteknya pelaksanaan hak perwalian anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya?			
			2. Tanggung Jawab Asuransi Atas ganti Rugi Kepada Tertanggung Dalam Kelalaian Maupun Kenakalan Agen Asuransi	1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen (tertanggung) dan asuransi (penanggung) terhadap kelalaian maupun kenakalan agen asuransi?		-	
				2. Bagaimana ganti rugi yang diterima kepada tertanggung jika klaim tidak dapat cair atas kelalaian atau kenakalan agen?			
			3. Analisis Tentang Kecelakaan Lalu Lintas di Bawah Umur (Studi Kasus Abdul Qodir Jaelani (Dul))	1. Bagaimana penyelesaian kasus jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur?		-	
				2. Bagaimana tanggung jawab orangtua atas kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anaknya yang masih di bawah umur?			
13	Listianingrum	2011-41-109	1. Penerapan Sistem <i>Multi Door</i> Terhadap Kejahatan Lingkungan	1. Apakah penerapan <i>Multidoor</i> setelah dua tahun ini berjalan, penanganan sumber daya alam dan lingkungan hidup ampuh membongkar modus, meberikan efek jera, mengurangi kerugian negara dan membantu pemulihan lingkungan hidup?			

				2. Bagaimana penerapan <i>Multidoor</i> dalam pemidanaan terhadap kejahatan lingkungan?			
			2. Penyelesaian Sengketa Lokasi Prostitusi Daerah Jembatan Genit Jakarta Barat	1. Apakah permasalahan yang sering terjadi di lokasi prostitusi sehingga sering terjadi keributan anat preman atau PSK satu dengan yang lainnya?	Henry Arianto	Diterima	Kajian Empiris
				2. Bagaimanakah cara menyelesaikan sengketa di lokasi prostitusi tersebut tanpa ada campur tangan penegak hukum mengingat prostitusi adalah suatu pekerjaan illegal?			
				3. Bagaimanakah struktur dalam komunitas premanisme di lokasi prostitusi?			
			3. Reseller (Dropshipping) Online Dalam Syariat Hukum Islam	1. Bagaimana keabsahan dan kehalalan dari reseller (dropshipping) online dalam syariat hukum Islam?		-	
				2. Apakah yang mendasari reseller (dropshipping) online menjadi halal atau haram dalam syariat Islam?			
				3. Bagaimanakah tata cara jual beli yang sah menurut syariat Islam?			
14	Yasnawati	2011-41-099	1. Tinjauan Mengenai Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Tanah Adat di Kelurahan Kalawa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah)	1. Bagaimana kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) yang berlaku di Kelurahan Kalawa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah?		-	
				2. Apakah Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) itu dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi perusahaan yang melakukan pembebasan lahan dalam kasus Tanah Adat di Kelurahan Kalawa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah?			
			2. Tinjauan Mengenai Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) Berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Bawah Umur Di Tamansari, Jakarta Barat)	1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) yang ada di Tamansari, Jakarta Barat?	Nurhayati	Diterima	Judul Direvisi
				2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyikapi maraknya Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) di wilayah ibukota?			

			3. Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/PID.SUS/2014 (Studi Kasus: Pemerkosaan yang dilakukan Seorang Wanita Terhadap Anak di Bawah Umur)	1. Bagaimanakah penerapan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/pid.sus/2014?			
--	--	--	--	--	--	--	--

				2. Adakah kaitannya antara teori asosiasi diferensial dalam teori kriminologi yang menyebabkan pelaku tindak pidana kejahatan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/pid.sus/2014?			
15	Destiya Purna Panca	2011-41-004	1. Tinjauan Hukum Regulasi Bank Indonesia Terkait Praktek Gadai Emas Syariah yang Mengakibatkan Kerugian Pada Nasabah (Studi Kasus antara Butet Kertaradjasa melawan Bank BRI Syariah)		Irdanuraprida Id	Diterima	Masukkan Rumusan Masalah
			2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas PHK Sepihak dan Perhitungan Uang Hak Pekerja Dihubungkan Dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 (Putusan No. 44/PHI.G/2014/PN.JKT.PST)	1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak karena bukan kesalahan dari pekerja?		-	
				2. Bagaimana hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha akibat dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak?			
			3. Analisis Hukum dan Faktor Pendorong Perusahaan yang Telah <i>Go Public</i> Melakukan <i>Go Private</i> (Studi Kasus PT. Aqua Golden Missisipi)	1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong perusahaan yang telah <i>Go Public</i> melakukan <i>Go Private</i> dan bagaimana pengaturan pelaksanaannya dalam hukum pasar modal?		-	
				2. Apakah keputusan PT. Aqua Golden Missisipi melakukan <i>Go Private</i> dapat meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan?			
				3. Bagaimanakah akibat hukum dari <i>Go Private</i> terhadap para pemegang saham PT. Aqua Golde Missisipi?			
16	Jemmy	2011-41-052	1. Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Phedofilia</i> di Indonesia	1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana <i>Phedofilia</i> di Indonesia?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Apa sanksi bagi pelaku tindak pidana <i>Phedofilia</i> sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia?			
			2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen pelayanan jasa kesehatan?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Apakah pihak pasien yang dirugikan sebagai konsumen jasa pelayanan di bidang kesehatan menuntut ganti rugi?			
			3. Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia	1. Bagaimana pengaturan malpraktek medis dalam sistem hukum di Indonesia?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji

				2. Bagaimana ketentuan yuridis terhadap terjadinya malpraktek medis sesuai dengan sistem hukum Indonesia?			
17	Erick Louis	2011-41-020	1. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Semende	1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat Semende?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Status kepemilikan tanah ulayat masyarakat Semende yang ingin dijadikan sebagai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (yang selanjutnya disebut TNBBS) pasca keluarnya putusan mahkamah konsititusi?			
			2. Kajian Terhadap Asuransi Kesehatan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ditinjau Dari Prinsip-prinsip Hukum Asuransi	1. Apakah asuransi kesehatan BPJS sesuai dalam prinsip-prinsip hukum asuransi?	Ade Hari Siswa	Diterima	Judul Direvisi
				2. Perlindungan hukum bagi pengguna asuransi kesehatan BPJS menurut prinsip-prinsip hukum asuransi?			
18	Elbert	2011-41-125	1. Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Pajak Pertambahan Nilai yang Terindikasi Fiktif (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647/B/PK/PJK/2012)	1. Apakah putusan Hakim Mahkamah Agung mengenai penolakan pengajuan peninjauan kembali oleh LSI atas peningkatan pajak pertambahan nilai yang kurang bayar dikarenakan faktor pajak yang tidak sah atau fiktif telah tepat?	Zulfikri Aboeba	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing dan Judul Tergantung dari Pembimbing
				2. Bagaimana faktor pajak dapat dikondisikan sebagai faktor pajak fiktif dan bagaimana konsep dasar dari penentuan pajak sah atau tidak?			
			2. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlakuan Hukum Pajak Penghasilan Atas Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208 B/PK/PJK/2012)	1. Apakah putusan Hakim Mahkamah Agung mengenai penolakan pengajuan peninjauan kembali oleh Direktur Jendral Pajak atas perlakuan hukum pajak penghasilan atas keuntungan atau kerugian selisih kurs yang dimasukkan sebagai nilai perolehan pada tanggal neraca telah tepat?	Zulfikri Aboeba	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing dan Judul Tergantung dari Pembimbing
				2. Bagaimana perlakuan hukum pajak penghasilan atas keuntungan atau kerugian selisih kurs?			
19	Wisnu Eko Raharjo	2011-41-008	1. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 590 K/PDT.SUS/2012 Tentang Sengketa Persamaan Merek Dagang Antara "BIORE" dan "BIORF"	1. Mengapa pengadilan niaga jakarta pusat memutuskan kasus ini tidak ada persamaan pada pokoknya?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji

				2. Bagaimana kriteria dari persamaan pada pokoknya dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek?			
			2. Analisis Putusan No. 34/PDT.G/2010/PN.DPK Terhadap Penguasaan Tanah dan Penjualan Tanah Hibah	1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penguasaan dan penjualan tanah hibah dalam Putusan No 34 Pdt.G/2010/PN.Dpk?	Fauzie Kamal	Diterima	Konsultasi Dengan Pembimbing mengenai judul
				2. Bagaimana akibat hukum Putusan No. 34/Pdt.G/2010/PN.Dpk terhadap tanah obyek sengketa?			
20	Arief Munandar	2011-41-115	1. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 476 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 Mengenai Perbandingan "Asas First To File" di Indonesia dengan Pendaftaran Merk di Japan	1. Bagaimana kedudukan asas first to file dalam pendaftaran merek di Indonesia dengan merek perusahaan asing yang ingin di daftarkan di Indonesia dil lihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 476 K/Pdt.Sus-NPSK/2013?	Prof. Hendra	Diterima	Konsultasi Dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Bagaimana cara pembatalan merek yang dilakukan oleh Dirjen HKI yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001?			
			2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 400 K/Pdt.Sus/2011 Mengenai Pengesahan Merek Dagang	1. Apakah pertimbangan hukum pengadilan negeri niaga Jakarta Pusat yang memutuskan gugatan penggugat ditolak berdasarkan putusan Mahkamah Agung No: 400 K/Pdt.Sus/2011?		-	
				2. Apa tanggung jawab Dirjen HKI kepada penggugat atas kelalaiannya mengesahkan suatu merek baru dan sangat merugikan penggugat di lihat dari Undang-undang No. 15 Tahun 2001?			
			3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak	1. Apa hukuman atau sanksi yang diterima oleh pekerja yang memutuskan kerja sepihak berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Pdt.Sus-PHI/2014?		-	
				2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa bagi pekerja yang memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan perusahaan menurut UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial?			
21	Hafiz Akbar	2011-41-012	1. Pengaturan Sanksi Pidana dan Kebijakan Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Penghasilan di Kota Tangerang	1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana dalam upaya meningkatkan pendapatan perpajakan di bidang pajak penghasilan di kota Tangerang?		-	

				2. Bagaimanakah kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak khususnya Kantor Wilayah I Direktorat Jendral Pajak Kota Tangerang dalam mengatasi permasalahan di bidang pajak penghasilan yang terjadi di kota Tangerang?			
			2. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana Pajak Ditinjau Atas Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Dengan Perkara No. 2239 K/PID SUS/2012) (Sudah Bimbingan Dengan Bpk. Zulfikar Judge dan Zulfikri Aboebakar, mohon dekanat mempertimbangkan)	1. Bagaimana penerapan hukum pajak ditinjau dari aspek hukum administrasi negara?	Zulfikri Aboeba	Diterima	
				2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pajak dalam kasus No. 2239 K/PID.SUS/2012?			
22	Denny Fajar Setiadi	2010-41-095	Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Saksi Anak yang Tidak Disumpah Dalam Kasus Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 292/pid.sus/2012/PN.SGR)	1. Bagaimana kedudukan saksi anak yang tidak disumpah sebagai alat bukti dalam tinjauan hukum acara pidana (KUHAP)?	Panhar Makawi	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing Mengenai Judul
				2. Apakah kesaksian saksi anak dalam perkara Nomor 292?Pid.Sus/2012/PN.SGR dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah?			
23	Adji Anggara Prasandy	2010-41-051	Pengangkatan Anak dan Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Syariah	1. Bagaimana penerapan syariah terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat muslim di Indonesia?		Ditolak	Prinsip Hukum Islam tidak Mengenal Anak Angkat
				2. Bagaimanakah Putusan Pengadilan Negri dan Pengadilan Agama terhadap hak anak angkat beragama Islam atas harta peninggalan orang tua angkatnya?			
24	Kurniawan	2011-41-063	1. Hilangnya Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 97/PUU-XI/2013)	1. Bagaimana pengaturan ruang lingkup kewenangan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah?	Wasis Susetio	Diterima	
				2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 terhadap kewenangan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah?			

			2. Penambahan dan Pengurangan Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Tanpa Amandemen UUD 1945 Bentuk Pengingkaran Terhadap Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 97/PUU-XI/2013)	1. Bagaimana pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945?			
				2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi?			
25	Yeris Andika	2011-41-128	1. Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Hidup	1. Apakah hukuman mati memang harus dilakukan dan memiliki legitimasi dalam sistem hukum Indonesia maupun hukum internasional?	Gousta Feriza	Diterima	
				2. Apakah hukuman mati tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia?			
			2. Legitimasi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	1. Apa saja ruang lingkup kewenangan Jaksa Pengacara Negara?			
				2. Bagaimana legitimasi Jaksa Pengacara Negara terhadap perkara perdata perseroan milik BUMN/BUMD?			
				3. Bagaimana penerapan hukum litigasi terkait perbedaan pengaturan Jaksa Pengacara Negara?			
			3. Studi Kritis Nilai Keadilan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	1. Apakah ketentuan pencemaran nama baik itu sesuai dengan spirit keadilan?			
				2. Apakah ancaman sanksi pidana tersebut tindakan preventif atau suatu perangkap?			
26	Caroline Waty	2011-41-136	1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan	1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan?			
				2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan?			

			2. Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia	1. Bagaimana peran korban dalam kejahatan Eksploitasi Seksual Komersil Anak?	Ahmad Sofian	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing Mengenai Judul
				2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia?			
27	Manuel Fortunatus Tirta	2011-41-175	1. Kajian Yuridis Terhadap Penggunaan Kata Warung Kopi (Kopitiam) yang Disahkan Sebagai Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia No. 179 PK/PDT.SUS/2012)	1. Apa yang menjadi latar belakang disahkannya kata Kopitiam yang merupakan kata umum menjadi sebuah merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?	Agung Nugroho	Diterima	
				2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap sebuah merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual? Melihat banyak sekali penggunaan suatu merek dagang tanpa izin dari pemilik merek yang terlebih dahulu mendaftarkannya.			
				3. Sebagai pihak yang berada di posisi mediator, seberapa besarkah peranan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menentukan kata-kata mana yang dapat didaftarkan menjadi sebuah merek?			
				4. Apabila mengacu kepada Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, suatu kata yang bersifat atau berarti umum atau terkait dengan suatu objek merek (benda sehari-hari atau objek atas merek itu sendiri) tidak dapat didaftarkan, terkait dengan hal tersebut apakah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat diminta pertanggungjawabannya karena telah meloloskan merek Kopitiam? Dan siapakah yang paling bertanggungjawab dalam hal ini (<i>Person in Charge</i>)?			
			2. Kajian Terhadap Penerapan Pajak Restoran Pada Usaha Kecil dan Menengah (Warung Tegal) Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Apa yang menjadi alasan pajak warteg tidak dapat diterapkan di masyarakat?			
				2. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pajak warteg tersebut?			

			3. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Merek Terkenal "Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Dengan Larutan Penyegar Cap Badak" (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 108 PK/Pdt.Sus/2011)	1. Bagaimana kekuatan hukum terhadap sebuah merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual? Melihat bahwa banyak sekali penggunaan suatu merek dagang tanpa izin dari pemilik merek yang terlebih dahulu mendaftarkannya.			
				2. Sebagai pihak yang berada di posisi mediator, seberapa besarkah peranan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menentukan kata-kata mana yang dapat didaftarkan menjadi sebuah merek?			
28	Handajani	2011-41-121	1. Kajian Penarikan Kembali Kembali Sertifikat Merek Buddha Bar Ditinjau dari Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	1. Apakah yang menjadi dasar penarikan kembali sertifikat merek Buddha Bar?	Gousta Feriza	Diterima	
				2. Apa dampak yang terjadi pada penarikan sertifikat merek Buddha Bar di Indonesia?			
			2. Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan No. 165/PK/Pdt.Sus/2012)	1. Apakah ketentuan mengenai merek terkenal berlaku untuk jenis barang yang berbeda kelas?			
				2. Apakah kriteria mengenai suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal?			
29	Ginawaty	2011-41-133	1. Implikasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Pada PT ASP)	1. Bagaimana implikasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pengusaha nasional?	Dhoni Yusra	Diterima	
				2. Bagaimana implikasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap perekonomian nasional, kedaulatan penguasaan tambang oleh negara serta pengaturan hukum pertambangan?			

			2. Implementasi Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Nasional Produksi Pakaian bayi (Studi Kasus Pada PT. BKI)	1. Bagaimana <i>Das Sollen</i> dan <i>Das Sein</i> yang terjadi terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 07/M-IND/PER/2/2014?		-	
				2. Apakah faktor penghambat dan solusi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 07/M-IND/PER/2/2014?			
			3. Pemberlakuan Perhitungan Upah Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Industri Kecil	1. Bagaimana realisasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang bekerja di industri kecil?		-	
				2. Apakah ada konsekuensi hukum terhadap usaha kecil yang tidak mampu membayar upaha sesuai dengan Upah Minimum yang ditetapkan?			
				3. Bagaimana peranan pemerintah dalam hal ini, usaha kecil yang secara tidak langsung mengurangi angka pengangguran tetapi tidak mampu membayar upah sesuai UMR?			
30	Raden Yoga Gustiana	2009-41-018	Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Karya Cipta Lagu Dari Plagiarisasi (Analisa Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung No. 385 K/Pdt.Sus/2009)	1. Bagaimana perlindungan hak cipta bagi para pencipta lagu dari plagiarisasi?	Prof. Hendra	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Apakah langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa tentang hak cipta?			
31	Ratih Dena Arena Wati	2011-41-056	1. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi atau Mengevaluasi Cela Hukum yang Terjadi Pada Pasal 59 UU No 13/2003 Ketenagakerjaan	1. Peranan pemerintah dalam menanggulangi atau mengevaluasi cela hukum pada permasalahan hukum yang terjadi pada pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.	Agus Suprayogi	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul dan Harus Didukung Kasus

				2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban PHK untuk dapat memenuhi hak-haknya.			
			2. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Hak Pekerja Sebagai Pembantu Rumah Tangga (Berdasarkan Undang-undang)	1. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi hak-hak pembantu rumah tangga berdasarkan UU Ketenagakerjaan.			
				2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan pembantu rumah tangga apabila majikan tidak memberikan hak-haknya.			
32	Natalia Yesica	2009-41-172	Tinjauan Peranan Instrumen Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) Terhadap Aspek Penataan Lingkungan (Studi Kasus PT. Soci Mas)	1. Sejauh mana peran dan fungsi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan UUPH Nomor 23 Tahun 2009?	Zulfikar Judge	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Permasalahan
				2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup jika tidak memenuhi kriteria yang berlaku dalam penilaian standar Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER)?			
33	Matus Subang	2011-41-134	1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau Dari UU No. 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Pada PT. XYZ)	1. Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. XYZ?			
				2. Bagaimanakah UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan hukum bagi karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. XYZ?			
			2. Perkawinan Campur Kaitannya Dengan Pengasingan Tanah Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 1 Tahun 1974	1. Bagaimanakah pengaturan kepemilikan tanah terhadap pasangan yang melakukan perkawinan campur di Indonesia menurut UUPA dan UU Perkawinan?	Nizla Rohaya	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap kepemilikan tanah apabila terjadi adanya perceraian dalam perkawinan campur di Indonesia menurut UU Perkawinan?			
34	Ketty Widyasari	2011-41-135	1. Akibat Hukum Terhadap Keberadaan Peraturan Perusahaan Ditinjau Dari Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Pada PT. XYZ)	1. Bagaimana dampaknya bagi perusahaan/pengusaha apabila perusahaan tidak memiliki peraturan perusahaan secara tertulis?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji

				2. Bagaimana dampaknya bagi pemenuhan hak-hak pekerja apabila perusahaan tidak memiliki peraturan perusahaan secara tertulis?			
			2. Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Pada PT. XYZ)	1. Apa saja potensi dan kendala yang menyebabkan terjadinya pelanggaran perusahaan dalam penggunaan TKA dalam praktek pembatasan TKA oleh UU Ketenagakerjaan?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Bagaimana peranan UU Ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan pelanggaran penggunaan TKA ini (das sein dan <i>das sollen</i> nya)?			
35	Chyntia Ros	2011-41-103	1. Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Kekerasan yang Dilakukan <i>Debt Collector</i> Terhadap Nasabah Bank Terkait Tagihan Kartu Kredit (Studi Kasus Putusan Nomor 1298 K/PID/2012)	1. Tindak pidana apa sajakah yang dapat timbul dari kekerasan yang dilakukan debt collector dalam menagih hutang nasabah kartu kredit?	Nugraha Abdulk	Diterima	
				2. Siapa yang bertanggungjawab secara pidana terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh debt collector dalam menagih hutang nasabah kartu kredit?			
			2. Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Dibawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak	1. Apakah dengan berprofesi sebagai artis anak dibawah umum merupakan bentuk tindak pidana eksploitasi anak?		-	
				2. Bagaimana formulasi kebijakan pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?			
				3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi sebagai artis di bawah umur?			
			3. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Terkait Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	1. Bagaimana pengawasan terhadap peredaran obat keras?		-	
				2. Apa akibat hukum bagi pengedar obat keras yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat?			
36	Ali Akiram	2011-41-142	1. Ketentuan Sertifikasi Anggota Security Ditinjau Dari Perkap No. 24 Tahun 2007 Studi Kasus di PT. CSI	1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan sertifikasi bagi satuan pengamanan?		Ditolak	Bukan Merupakan Penelitian Hukum

				2. Bagaimana terjadi seorang satuan pengamanan telah bertugas namun belum melalui tahap pelatihan atau sertifikasi atas pelatihan tersebut?			
				3. Bagaimana mengantisipasi agar tidak ada satuan pengamanan tanpa melalui pelatihan dasar satuan pengamanan atau tanpa sertifikasi?		Ditolak	Judul Bersifat Umum
			2. Kontrak Kerjasama Antara Pemberi Jasa dan Penerima Jasa Tanpa Surat Perjanjian Kerjasama Studi Kasus di PT.CSI	1. Bagaimana terjadinya kerjasama tanpa surat perjanjian kerjasama?			
				2. Mengapa suatu kerjasama harus ada surat perjanjian kerjasama?		Ditolak	Judul Bersifat Umum
				3. Apa yang dapat dilakukan jika terjadi perselisihan tanpa adanya perjanjian kerjasama?			
			3. Penerapan Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Studi Kasus di PT. CSI	1. Bagaimana sistem pengupahan pada Outsourcing sehingga tenaga kerja menerima upah di bawah standar minimum?			
				2. Bagaimana cara supaya hak atas upah minimum pekerja dapat terpenuhi?			
				3. Apa yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja apabila menerima upah di bawah standar minimum?			
37	Aloysia Nindita Paramita	2011-41-112	1. Pengaturan Pensiun Dini Berdasarkan Ketentuan Ketenagakerjaan Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123K/PDT.SUS/2012)	1. Bagaimana pengaturan mengenai pensiun dini berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia?	Elok Hikmawati	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai judul
				2. Apa yang seharusnya diterima pekerja terkait dengan hak pensiun dininya?			
			2. Penerapan Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Pada PT. XYZ)	1. Bagaimana pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003?		-	
				2. Bagaimana penerapan hukum untuk pelanggaran norma larangan dalam lingkungan perusahaan?			
			3. Kedudukan Peraturan Perusahaan dan Perizinan Tenaga Kerja Dalam Suatu Entitas Ditinjau Dari Aspek Legalitas (Studi Kasus PT. XYZ)	1. Bagaimana legalitas Peraturan Perusahaan pada PT. XYZ?		-	

				2. Bagaimana kelengkapan perizinan tenaga kerja pada PT. XYZ?			
				3. Apa dampak dari Ketidaklegalan Peraturan Perusahaan dan kelengkapan izin tenaga kerja pada PT. XYZ?			
38	Sukimto Fahrudin	2011-41-159	Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Waris Berdasarkan Golongan Penduduk Bagi Warga Negara Indonesia	1. Mengapa dalam pembuatan surat keterangan waris masih terdapat penggolongan penduduk?		Ditolak	Judul Bersifat Umum
				2. Bagaimanakah akibat hukum dari surat keterangan waris berdasarkan golongan tersebut pada saat ini?			
39	Hongky Remond Panarifsa	2010-41-117	1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Batak Toba Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengangkatan Anak Keluarga Robert Sigalingging Dengan Elis Herawaty Manullang)	1. Bagaimana syarat-syarat dan proses pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba?	Fokky Fuad	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai judul
				2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum adat Batak Toba setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?			
			2. Kedudukan Anak di Mata Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 663/PID/B/2010/PN.DPK)	1. Faktor apa saja yang mempengaruhi anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian?		-	
				2. Bagaimana kedudukan anak dihadapan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencurian di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?			
				3. Bagaimana sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?			
			3. Penegakan Hukum Terhadap Pidana Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 205/Pid/2014/PT.BDG.)	1. Bagaimana proses terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah?		-	
				2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah?			
				3. Kendala-kendala yang dihadapi aparaturnya penegak hukum dalam tindak pidana pemalsuan ijazah?			
40	Albertus Apolinaris Gon	2010-41-125	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terhadap Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan dan Pembahasan Rancangan Undang-undang	1. Apa kendala kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang berdasarkan UU No. 27/2009 dan UU No. 12/2011?	Joko Widodo	Diterima	

				2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang?			
41	Fauzan Ali	2011-41-155	1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 954 K/PID/2010)	1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pembantuan tindak pidana penggelapan berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 954 K/Pid/2010?		Ditolak	
				2. Bagaimana alasan hakim dalam memberikan dasar peringan pidana pada terdakwa tindak pidana penggelapan?			
			2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan MA No. 1243 K/PID/2011)	1. Apakah perbuatan para pelaku telah memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP? (Studi Kasus Putusan MA No. 1243 K/Pid/2011)		Ditolak	
				2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diterima oleh korban tindak pidana penganiayaan? (Studi Kasus Putusan MA No. 1243 K/Pid/2011)			
			3. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Malpraktek yang Dilakukan oleh Bidan Profesi Tidak Tetap di Tulungagung (Studi Putusan No. 2101 K/PID.SUS/2010)	1. Apakah putusan hakim telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan? (Studi Putusan Nomor 2101 K/Pid.Sus/2010)	IKG Widjaja	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai judul
				2. Bagaimana tinjauan mengenai jenis-jenis tindak pidana malpraktek dilihat dari delik? (Studi Putusan Nomor 2101 K/Pid.Sus/2010)			
42	Gideon	2011-41-058	1. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian (Kealpaan) yang Menyebabkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1326 K/PID/2010)	1. Apakah unsur-unsur dalam pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang telah terpenuhi? (Putusan MA RI Nomor 1326 K/Pid/2010)?		Ditolak	
				2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang? (Putusan MA RI Nomor 1326 K/Pid/2010)?			

			2. Tinjauan Yuridis Mengenai Hapusnya Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1537/K/PID/2010)	1. Apa yang menjadi alasan-alasan hapusnya pidana menurut KUHP?	Panhar Makawi	Diterima	
				2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan terdakwa kasus tindak pidana penganiayaan dengan menjatuhkan putusan bebas (studi putusan Mahkamah Agung No. 1537 K/Pid/2010)?			
			3. Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 254/PID.B/2011/PN.JKT.PST)	1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?		Ditolak	
				2. Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksua terhadap anak sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Putusan Nomor 254/Pid.B/2011/PN.JKT.PST)?			
43	Ediarno	2011-41-139	1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan UU No 5/1999 Studi Kasus Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2013 dan Putusan PN Jakarta Utara No. 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT	Apa pertimbangan majelis KPPU dan majelis hakim PN Jakarta Utara didalam membuat putusan atas dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Zulfikri Aboeba	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
44	Adi Utama Soegiarto Hanafi	2010-41-070	Analisa Hukum Atas Putusan MK Nomor 1/PPU-XI/2013 Mengenai Pasal 335 KUHP	1. Bagaimana kepastian hukum bagi masyarakat sejak dikeluarkannya putusan MK	Anna Triningsih	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul dan Permasalahan
				2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan			
45	Reni Suryanti	2008-41-046	Maraknya Kejahatan di Dunia Maya (Cyber Crime)	1. Bagaimana maraknya kejahatan yang terjadi di dunia maya?		Ditolak	Judul Bersifat Umum
				2. Bagaimana peraturan hukum di Indonesia dibidang Teknologi Informasi?			
46	Nathanael Hartono	2010-41-055	Penerapan Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Sarana Peningkatan Kinerja Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Bank Central Asia, Tbk.	1. Bagaimana penerapan Perjanjian Kerja Bersama sebagai sarana peningkatan kinerja perusahaan dan kesejahteraan pekerja berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?		Ditolak	Judul Bersifat Umum

				2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang mungkin timbul dari penerapan Perjanjian Kerja Bersama ini dan solusi apa saja yang memungkinkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?			
47	Yuni Ekawati	2010-41-102	Analisa Hukum Terhadap Kedudukan Hukum Kreditur Dalam Hal Melakukan Ekskusi Terhadap Objek Jaminan Kredit yang Tidak Dibebankan Jaminan Kebendaan Pada Saat Debitur Wanprestasi	1. Dalam prakteknya apabila debitur wanprestasi, apakah kreditur dapat melakukan ekskusi terhadap objek jaminan perjanjian kredit yang tidak dibebankan jaminan kebendaan (Studi Kasus akta Pengakuan Hutang tertanggal 22 Januari 2014 Nomor 09 yang dibuat dihadapan MEILINA SIDARTA,SH)?	Fitria Olivia	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Bagaimana proses eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan perjanjian kredit yang tidak dibebankan jaminan kebendaan (Studi Kasus akta Pengakuan Hutang tertanggal 22 Januari 2014 Nomor 09 yang dibuat dihadapan MEILINA SIDARTA,SH)?			
48	Thio Margaret	2011-41-143	Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 217/B/PK/Pjk/2012 Perihal Pajak Pertambahan Nilai Atas Biaya Pengelolaan Investasi Untuk Produk Unit-Link Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa	Direktorat Jenderal Pajak/tim pemeriksa beranggapan bahwa biaya pengelolaan investasi tersebut merupakan Jasa Kena Pajak yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan wajib pajak/Perusahaan Asuransi Jiwa berpendapat bahwa biaya pengelolaan investasi tersebut bukan merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai.	Zulfikri Aboebal	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
49	Muhammad Raiyani	2008-41-043	1. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Ditinjau Dari KUHAP dan KUHP (Analisa Putusan No. 1116/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel)	1. Bagaimana proses berita acara di kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?		Ditolak	
				2. Bagaimana analisis putusan No. 1116/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditinjau dari KUHP dan KUHAP?			
			2. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisa Putusan Nomor 167-K/PM II-08/AD/VI/2011/ Pengadilan Militer Jakarta Timur)	1. Bagaimana proses hukum tindak pidana narkotika yang pelakunya adalah anggota TNI?	Gousta Feriza	Diterima	
				2. Bagaimana analisa putusan No. 167-K/PM II-08/AD/VI/2011 Pengadilan Militer Jakarta Timur?			

50	Aditya Firdausyi	2011-41-034	1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Tenaga Kerja Honorer Ditinjau Dari Aspek Jaminan Sosial	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja honorer dalam pelaksanaan program jaminan sosial?		Ditolak	Judul Bersifat Umum
				2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja honorer?			
			2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Pada Malam Hari di Supermarket	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari?	Agus Suprayogi	Diterima	Konsultasi dengan pembimbing mengenai Judul dan Permasalahan
				2. Hambatan-hambatan apa saja yang berkaitan dengan perwujudan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari?			
51	Lola Apriyanti	2011-41-062	1. Budaya Hukum Komunitas Death Metal di Ciledug Tangerang	1. Bagaimanakah mengatasi penyimpangan penggunaan narkoba pada komunitas death metal?	Henry Arianto	Diterima	Kajian Empiris
				2. Bagaimanakah hak komunitas dalam menyelenggarakan acara yang terhalang oleh ketersediaan tempat?			
				3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pada terjadinya sengketa antar penikmat musik death metal?			
			2. Efektifitas Perkawinan Perempuan di Bawah Umur 16 Tahun Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Medis	1. Bagaimana peraturan mengenai umur perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974?		-	
				2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan perempuan di bawah usia 16 tahun seperti yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974?			
				3. Apakah perkawinan perempuan dibawah umur 16 tahun yang diatur dalam undang-undang perkawinan sudah efektif dalam perspektif medis/kesehatan?			
52	Fahri Ramadhan	2010-41-003	1. Tanggung Jawab Pidana Pada Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari KUHP dan UU Informasi Teknologi Elektronik (Studi Kasus: Putusan PN Tangerang No. 236/Pid.Sus/2012/PN.TNG)	1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan analisa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 236/PID.SUS/2012/PN.TNG?	Agus Pribadiono	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Sudahkah putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 236/PID.SUS/2012/PN.TNG dalam mengadili tindak pidana pencemaran nama baik telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban?			

			2. Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran	1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran?		-	
				2. Bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran?			
				3. Bagaimana sikap dan respon masyarakat Kota Tangerang terhadap Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran?			
			3. (Analisa Putusan No. 274/PID.B/2012/PN.TNG) Terhadap Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana	1. Bagaimanakah tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 274/PID.B/2012/PN.TNG. dikategorikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?		-	
				2. Bagaimana dasar pertimbangan pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dengan hukuman 6 bulan pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini?			
53	Fadel Abby Faisal	2011-41-141	1. Analisa Yuridis Terhadap Tindakan Anarkis Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Jakarta Pusat Berdasarkan Putusan No. 967/PID.B/2012/PN.JKT.PST	1. Bagaimana tindakan pemerintah kepada <i>organisasi masyarakat</i> yang merusak kantor instansi pemerintah jika dilihat dari putusan pengadilan No. 967/PID.B/2012/PN.JKT.PST ?		-	
				2. Apakah sanksi yang diberikan terhadap organisasi masyarakat menurut UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang <i>organisasi masyarakat</i> ?			
			2. Legalitas Alat Bantu Seks (<i>Vibrator</i>) di Indonesia	1. Bagaimana legalitas alat bantu (<i>Vibrator</i>) di Indonesia?	Henry Arianto	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Dampak dari penggunaan alat bantu (<i>Vibrator</i>) ini untuk kesehatan bagi tubuh?			
			3. Analisa Yuridis Terhadap Komplain Atas Pelayanan Rumah Sakit Di Media Sosial	1. Apakah komplain pelayanan di media sosial termasuk pencemaran nama baik?		-	
				2. Dapatkah Prita Mulyasari dikenakan UU ITE dikarenakan tulisannya di media sosial?			

54	Ambar Setianingsih	2011-41-127	1. Analisa Yuridis Terhadap Peran Pemerintah Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Beragama (Putusan Nomor 127 PK/TUN/2009)	1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak yang terjadi dalam kasus perkara Nomor 127 PK/TUN/2009?	Getah Ester	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Apakah yang menjadi penghambat kebebasan beragama di Indonesia?			
			2. Analisa Hukum Atas Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Dikaitkan Dengan Penetapan Nomor: 92/G/2012/PTUN-JKT	1. Bagaimana pelaksanaan pemberian grasi terhadap terpidana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi?		-	
				2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nomor 92/G/2012/PTUN-JKT berdasarkan undang-undang grasi?			
			3. Analisa Yuridis Penggunaan Kadaver Untuk Keperluan Pendidikan di Bidang Ilmu Kedokteran Berdasarkan Hukum Kesehatan	1. Bagaimanakah prosedur penggunaan kadaver yang tidak memiliki identitas dari rumah sakit X?		-	
				2. Bagaimana prosedur penggunaan kadaver menurut hukum kesehatan?			
55	Devia Fuzi Lestari S.	2011-41-140	1. Keberadaan Kontrak Baku Setelah Berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen	1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian baku dalam karcis parkir?		Ditolak	Judul Bersifat Umum
				2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelola parkir dengan diberlakukannya klausula baku dalam karcis parkir, apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang konsumen di area parkir?			
			2. Analisis Yuridis Terhadap Truk Angkutan Barang yang Menggunakan Gambar/Tulisan yang Mengandung Pornografi	1. Apakah gambar/tulisan yang ada di truk merupakan pornografi berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?	IKG Widjaja	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing
				2. Bagaimana proses penindakan gambar pornografi yang berada di truk yang ada di jalan raya?			
			3. Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Angkutan Umum Bis Metromini Rute Blok M - Ciledug	1. Bagaimana UU No. 22 Tahun 2009 mampu melindungi keselamatan penumpang?		-	
				2. Bagaimana PT. Metro Mini melakukan perekrutan dan pengawasan terhadap perilaku supir dalam berkendara demi menjamin keselamatan penumpang?			

56	Vebriyanto	2011-41-067	1. Peninjauan Kembali Hukum Pidana Dapat Diajukan Berulang-ulang (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013)	1. Bagaimana pengaturan mengenai Peninjauan Kembali menurut Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP?	Joko Widodo	Diterima	
				2. Mengapa pengajuan Peninjauan Kembali yang diatur pada Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dianggap bertentangan dengan UUD 1945?			
			2. Lahirnya Kepastian Hukum Bagi Tersangka dan Keluarga Tersangka Penangkapan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013)	1. Bagaimana pengaturan mengenai jangka waktu penangkapan menurut Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP?		-	
				2. Mengapa pengajuan surat penangkapan yang diatur pada Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP bertentangan dengan UUD 1945?			
57	Tom Apriano	2011-41-027	1. Penerapan Pidana Tutupan Dalam KUHP Terkait Delik Politik Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2009-2014	1. Bagaimana penerapan pidana tutupan untuk para politisi yang berada dalam delik politik yang terjadi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014?	Richi Aprian	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan pidana tutupan bagi para politisi yang tengah memiliki delik politik dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2009-2014?			
			2. Pendekatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Terkait Diversi (Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 480/PID.SUS/2013/PN.TNG)	1. Apakah diversi dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan putusan perkara nomor 480/Pid.Sus/2013/PN.TNG?		-	
				2. Bagaimana kedudukan dan mekanisme diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan putusan perkara nomor 480/Pid.Sus/2013/PN.TNG?			
58	Radhiyan Khairil Anwar	2011-41-031	Analisa Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal Dalam Hal Kebijakan Kriminal Sesuai Dengan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal	1. Apa saja dampak yang mungkin ditimbulkan oleh tindak pidana pasar modal?	Ade Hari Siswanto	Diterima	Harus Ada Kasus
				2. Apa upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Pasar Modal?			

59	Jasper Daliz	2011-41-051	1. Penembakan Terhadap Gedung Sekolah Bertanda PBB di Gaza Oleh Israel Tahun 2014 Dikaitkan Dengan Hukum Humaniter Internasional	1. Apakah penggunaan artileri merupakan tindakan yang tepat mengingat target berada dalam daerah pemukiman?	Kresno Buntoro	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai judul
				2. Hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap pihak tentara Israel ditinjau dari hukum humaniter internasional dan konvensi-konvensi lainnya?			
			2. Penggunaan Bom Cluster Pada Perang Israel - Lebanon Tahun 2006 Serta Kaitannya Dengan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Statuta Roma	1. Apakah bom cluster termasuk di dalam kategori senjata tidak berpr kemanusiaan?	Kresno Buntoro	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai judul
				2. Apa saja bahaya yang ditimbulkan bila munisi cluster tersebut mengenai manusia, apalagi memasuki wilayah pemukiman sipil?			
				3. Hukuman apa yang dapat diberikan kepada pihak yang menggunakan bom cluster?			
60	Achmad Fauzi Nasution	2011-41-224	1. Analisis Efektifitas Peranan Serikat Pekerja Dalam Menjembatani Perselisihan PHK Di Perusahaan (X) Berdasarkan Pasal 25 UU No. 21/2000 Tentang Serikat Pekerja	1. Sejauh mana peranan serikat pekerja dalam menjembatani perselisihan pemutusan hubungan kerja di Perusahaan X?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Bagaimana cara yang ditempuh serikat pekerja dalam menjembatani perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Perusahaan X?			
			2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Atas Hak Cuti Melahirkan Berdasarkan Pasal 82 UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan	1. Bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja wanita ditinjau dari UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan Konvensi-konvensi Internasional?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Permasalahan apa sajakah yang timbul dalam perlindungan hukum tenaga kerja wanita?			
			3. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PHI No. 26/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst Pasca Putusan MK No. 12/PUU-I/2003 dan Surat Edaran No. 13/MEN/SJ-HK/1/2005	1. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam lingkup hubungan industrial terkait PHK sepihak oleh pengusaha terhadap buruh/pekerjanya yang melakukan kesalahan berat?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji

				2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan buruh/pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha karena diduga melakukan kesalahan berat pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003?			
61	Putri Permana Rizki	2011-41-010	1. Mengidentifikasi Bank Garansi Sebagai Pemindahan Kewajiban Apabila Nasabah Mengalami Wanprestasi Pada Bank X	1. Bagaimana fungsi dan peranan Bank Garansi serta syarat Bank Garansi dalam pemindahan kewajiban di Bank X?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Bagaimana jika nasabah mengalami wanprestasi, apa penyelesaian dan tindakan Bank Garansi di Bank X sebagai pemindahan kewajiban?			
			2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di PT X Dilakukan Secara Bipartit Menurut UU No. 2 Tahun 2004	1. Bagaimana penyelesaian hubungan industrial secara bipartit berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Bagaimana jika penyelesaian hubungan industrial secara bipartit di PT X tidak dapat terselesaikan? Apa upaya dan tindakan PT X selanjutnya untuk menangani perselisihan tersebut?			
			3. Analisis Perjanjian Kredit Pada Bank X Untuk Kegiatan Usaha Nasabah Berdasarkan Penerapan Prinsip Kehati-hatian	1. Bagaimana cara Pemberian Kredit Bank berdasarkan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle)?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Bagaimana penerapan Prinsip Kehati-hatian serta Analisis Perjanjian Kredit Bank untuk kegiatan usaha nasabah pada Bank X?			
62	Novita Syentia	2011-41-068	1. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pengangkutan Jenazah Manusia Melalui Udara Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pada PT.Lion Mentari Airlines	1. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan jenazah manusia melalui udara antara keluarga dengan PT. Lion Mentari Airlines?	Ade Hari Siswanto	Diterima	Kasus Harus Spesifik
				2. Bagaimana pertanggungjawaban PT. Lion Mentari Airlines dalam pengangkutan jenazah manusia Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan?			
			2. Analisis Yuridis Tentang Berlakunya Force Majeur Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)	1. Bagaimana pengaturan Waralaba (Franchise) dalam hukum kontrak di Indonesia?		-	

				2. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi akibat terjadinya force majeure dalam kontrak waralaba (Franchise) dan akibat hukumnya terhadap kontrak waralaba (Franchise) tersebut?			
				3. Apakah mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi akibat adanya force majeure dalam kontrak waralaba (Franchise)?			
			3. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Informasi yang Berlebihan Mengenai Produk yang Diiklankan Televisi Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	1. Bagaimanakah pengaturan pemberian informasi menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran?		-	
				2. Apa tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat informasi yang berlebihan dari iklan yang ditayangkan oleh televisi?			
63	Nared Aji Utami Widita	2011-41-097	1. Monopoli Negara Melalui PT. PLN (Persero) Dalam Bidang Kelistrikan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha	1. Bagaimanakah ketentuan pengecualian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap Badan Usaha Milik Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?	Maduseno	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Apakah memungkinkan bagi perusahaan milik swasta untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pembangkit listrik di Indonesia?			
			2. Peran Perusahaan Swasta Dalam Upaya Konservasi Hutan Bakau Ditinjau Dari Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PT. Murindra Sebagai Pengelola Taman Wisata Angke)	1. Apa saja kegiatan dan kendala yang dialami PT. Murindra dalam melakukan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi hutan bakau Muara Angke?		-	
				2. Apakah kegiatan yang dilakukan PT. Murindra selaku pengelola sudah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?			
				3. Dampak positif dan dampak negatif apa sajakah yang dialami kawasan konservasi sebagai media wisata dan kepentingan lainnya?			
			3. Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Hak Pinjam Pakai Tanah Magersari Keraton Yogyakarta Ditinjau dari Undang-undang Pokok Agraria	1. Bagaimanakah hak dan kewajiban hukum adat dalam pengurusan tanah magersari di Yogyakarta?		-	

				2. Bagaimana tanggung jawab Lurah/Kepala desa & BPN untuk membantu panitikismo dalam proses pengajuan hak pinjam pakai tanah magersari di Yogyakarta?			
64	Pardamean Lumban Tobing	2011-41-033	1. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1. Bagaimana transparansi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah?		Ditolak	Judul Bersifat Umum
				2. Bagaimana pertanggungjawaban aparatur negara apabila terjadi tindakan penyelewengan barang dan jasa berdasarkan UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JO.UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI?			
			2. Legalisasi Aborsi Ditinjau dari Perspektif Kode Etik Kedokteran	1. Bagaimanakah pengaturan legalisasi aborsi di Indonesia?	IKG Widjaja	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul (jo UU Kesehatan 2014)
				2. Bagaimana pandangan kode etik kedokteran terhadap legalisasi aborsi?			
			3. Implementasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	1. Bagaimana penegakan hukum menangani perkawinan di bawah umur?		-	
				2. Mengapa perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur masih belum berjalan secara optimal?			
65	Fandi Agustianus Salindeho	2012-41-156	1. Praperadilan Tentang Proses Penyitaan yang Inkonstitusional, Prematur, dan Melampaui Kewenangan Baik Secara Hukum dan Undang-undang (Analisis Putusan No. 02/PRA.PID/2013/PN.BKL)	1. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan dokumen negara sebagai barang bukti dalam suatu penyidikan?	Sri Redjeki	Diterima	
				2. Apa sanksi bagi pelaksana penegak hukum yang telah melakukan perbuatan yang inskontitusional dan premature sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia? (analisis putusan No. 02/PRA.PID/2013/PN.BKL)			
			2. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Phedofilia di Indonesia	1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana Phedofilia dalam KUHP?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji

				2. Bagaimana perbandingan masa hukuman terhadap pelaku Phedofilia dari sudut pandang KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak?			
				3. Bagaimana perlindungan korban tindak pidana Phedofilia di Indonesia?			
66	Finna Fitriyah	2011-41-148	1. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Dari Para Ulama dan Kaum Abangan Terhadap Minuman Toak di Tuban Jawa Timur	1. Bagaimana pendapat para ulama terhadap budaya minuman tuak di Tuban Jawa Timur?	Fokky Fuad	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Bagaimana pendapat para masyarakat abangan terhadap budaya minuman tuak di Tuban Jawa Timur?			
				3. Bagaimana penyelesaian terhadap budaya minuman toak dituban antara para ulama dan masyarakat abangan ditinjau dari hukum islam dan hukum adat dituban jawa timur?			
			2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Secara Paksa di Pesantren Terhadap Para Santri di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur	1. Bagaimanakah proses pemaksaan perkawinan terhadap para santri di pesantren?		-	
				2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemaksaan dalam perkawinan?			
			3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur	1. Bagaimana proses pelaksanaan adat perkawinan di Kabupaten Lamongan?		-	
				2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap adat perkawinan di Kabupaten Lamongan?			
67	Bachair Abil Arqam	2011-41-029	Perubahan Penyelenggaraan Jangka Waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 84/PUU-XI/2013)	1. Bagaimana pengaturan tentang RUPS dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?	I Gede Hartadi	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Bagaimana dampak putusan MK 84/PUU-XI/2013 terhadap pengaturan RUPS dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007?			

68	David Sandro Manik	2011-41-064	1. Pertimbangan Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Merupakan Perjanjian yang Telah Disepakati Oleh Para Pihak Guna Melakukan Pekerjaan Tertentu Selama dan Berakhir Pada Waktu Tertentu Tidak Berhak Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak	1. Mengapa kuli bangunan mendapatkan uang pesangon dalam bekerja selama lebih dari 2 tahun?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Apakah karyawan berhak mendapatkan uang penghargaan masa bekerja selama kontrak tersebut habis?			
				3. Apakah karyawan yang dipecat mendapatkan uang penggantian hak selama pekerja tidak melakukan tindak pidana?			
			2. Kajian Teoritis Tindak Kejahatan Pada Anak di Bawah Umur	1. Apakah yang menyebabkan si Iqbal Saputra menjadi sasaran korban dari kekasih ibunya Dadang Supriatna?		Ditolak	judul Bersifat Umum
				2. Bagaimana cara berpikir Dadang Supriatna untuk menganiaya si korban Iqbal Saputra dengan usia balita 3.5 tahun?			
				3. Mengapa pelampiasan kemarahan Dadang Supriatna timbul pada anak kecil yang ada pada si Iqbal Saputra?			
				4. Apa tidak cara lain untuk menghukum anak secara bertubi-tubi?			
69	Setiawan	2011-41-078	Tanggung Jawab Bank Sebagai Krediter Terhadap Nasabah Kartu Kredit Dalam Penagihan Kartu Kredit (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Dengan Perkara Nomor 3192 K/Pdt/2012) (Sudah Bimbingan Dengan Bpk. Zulfikar Judge, mohon dekanat mempertimbangkan)	1. Bagaimana prosedur penagihan Bank bagi debitur yang menunggak tagihan?	I Gede Hartadi	Diterima	Konsultasi dengan pembimbing mengenai Judul
				2. Bagaimana tanggung bank sebagai krediter terhadap nasabah kartu kredit dalam penagihan kartu kredit?			
70	Sri Maryam	2011-41-184	1. Hukum Pembuktian Pada Pemeliharaan Tanaman Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Batusangkar Sumatera Barat No. 31/Pid.Sus/2014/PN BS)	1. Bagaimana cara hakim membuktikan kepemilikan atas pemeliharaan ganja?	Panhar Makawi	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai judul
				2. Apa yang seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutus perkara no. 31/Pid.Sus/2014/PN BS?			

			2. Akibat Hukum Legalisasi Perkawinan Campur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam			-	
71	Henry Brian	2010-41-062	Tindak Pidana Perjudian di Jakarta Barat (Putusan No. 346/Pid.B/2013/PN.JKT.BAR)	1. Apakah putusan hakim tentang putusan No. 346/Pid.B/2013/PN.JKT.BAR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 2. Mengapa tindak pidana perjudian khususnya di wilayah Jakarta Barat masih terjadi? 3. Bagaimana upaya penanggulangan yang tepat dalam tindak pidana perjudian?		Ditolak	Judul Bersifat Umum
72	Adam Surya Alam	2010-41-083	Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Pra Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)	1. Bagaimanakah penyelesaian perkara pidana pada tahap pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? 2. Hambatan-hambatan apa sajakah dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan dan bagaimana solusinya yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan?		Ditolak	Judul Bersifat Umum
73	Julio Jagratara	2011-41-129	1. Pembuktian Keabsahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Selama Menjabat Periode 2009-2014 Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK	1. Bagaimana efektifitas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama menjabat periode Tahun 2009-2014 berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi? 2. Bagaimana proses pembuktian keabsahan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh KPK dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut?	Anatomi Muliawan	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
			2. Upaya Ekstradisi Buronan Koruptor yang Berada di Luar Negeri Dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi	1. Mengapa koruptor di Indonesia dapat dengan mudah melarikan diri ke luar negeri untuk melarikan tanggung jawab pidana dalam kasus korupsi? 2. Bagaimana proses ekstradisi koruptor Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri dan kendala apa saja yang terjadi dalam proses ekstradisi tersebut?		-	
			3. Penerapan Umum Ketentuan Pasal 146 Ayat 1 UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Vonis Hakim Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 239/PID.SUS/2013/PN.CBN)	1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri cibinong dalam memutus perkara Koutouan Jean Pierre dengan menerapkan ketentuan Pasal 146 ayat 1 UU 35 Tahun 2009?		-	

				2. Apakah ketentuan pasal 146 ayat 1 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan secara umum dalam vonis hakim dikaitkan dengan UU 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana?			
74	Dicky Januar Aulia	2009-41-117	Tinjauan Yuridis Mengenai Tindakan Passing Off Sebagai Pelanggaran Merek Dagang Dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual Terkait Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 122 K/PDT.SUS/2010)	1. Bagaimanakah penegakan hukum merek dalam tindakan <i>Passing Off</i> di Indonesia studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 122 K/PDT.SUS/2010 tentang Merek Natasha Skin Care?	Nugraha Abdulkadir	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Bagaimanakah upaya pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen dari akibat tindakan <i>Passing Off</i> Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 122 K/PDT.SUS/2010 tentang Merek Natasha Skin Care?			
75	Intan Audiasari	2011-41-081	1. Pembatalan Akta Nikah Penetapan Pengadilan Agama Karena Adanya Penistaan Agama (Studi Kasus Perkara No. 2390/pdt.g/2013/PA.dpk)	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan akta nikah dalam perkara No. 2390/pdt.g/2013/PA.dpk?	Tommy Prihananto	Diterima	Konsultasi Dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Akibat hukum bagi pihak yang terkait dalam penistaan agama?			
			2. Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta	1. Bagaimana sistem pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta?		-	
				2. Bagaimana penerimaan narapidana untuk pembinaan di Lapas Terbuka Jakarta?			
			3. Pelaksanaan Waktu Eksekusi Hukuman Mati Bagi Terpidana yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Upaya Pencarian Kepastian Hukum)	1. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana hukum mati di Indonesia?		-	
				2. Mengapa terjadi ketidakpastian pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana?			
76	Fahmi Mazid	2011-41-153	1. Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana di Indonesia	1. Apakah suntik mati atau Euthanasia sesuai dan tepat dengan hukum pidana yang ada di Indonesia?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Apa yang dimaksud dengan Euthanasia, klasifikasi euthanasia, cara dan tujuan Euthanasia itu?			
				3. Bagaimana Euthanasia menurut hukum di Indonesia?			
				4. Bagaimana pandangan HAM tentang Euthanasia?			

				5. Bagaimana kasus Euthanasia yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri?			
				6. Bagaimana Euthanasia dilihat dari sudut etika, moral, dan agama?			
				7. Apakah hak pasien akan terpenuhi dalam kasus Euthanasia tersebut?			
				8. Apa saja ruang lingkup Euthanasia itu dan bagaimana penyakit seseorang dapat dikategorikan sebagai Euthanasia?			
				9. Seperti apa dan bagaimana cara penegakan hukum menangani masalah Euthanasia yang terjadi di Indonesia?			
				10. Adakah jaminan hukum untuk seorang dokter yang membantu suntik mati atau Euthanasia terhadap seorang pasien?			
				11. Perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Euthanasia?			
				12. Bentuk Euthanasia seperti apa yang sering terjadi dan kita jumpai di masyarakat Indonesia dan apakah hal tersebut dapat ditindak lanjuti terhadap oknum yang secara tidak langsung telah melakukan tindakan Euthanasia?			
				13. Adakah dampak yang ditimbulkan dari Euthanasia tersebut terhadap masyarakat Indonesia?			
			2. Euthanasia dan Hak Asasi Manusia	1. Apakah suntik mati atau Euthanasia bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Bagaimana pandangan HAM tentang Euthanasia?			
				3. Apa yang dimaksud dengan Euthanasia, klasifikasi euthanasia, cara dan tujuan Euthanasia itu?			
				4. Bagaimana Euthanasia menurut hukum di Indonesia?			
				5. Sejauh mana HAM mengatur tentang permasalahan Euthanasia?			
				6. Bagaimana Euthanasia dilihat dari sudut etika, moral, dan agama?			
				7. Sejauh mana pengadilan HAM mengatur oknum seseorang yang membantu terjadinya Euthanasia?			
				8. Apa saja ruang lingkup Euthanasia itu dan bagaimana penyakit seseorang dapat dikategorikan sebagai Euthanasia?			
				9. Seperti apa dan bagaimana cara penegakan hukum menangani masalah Euthanasia yang terjadi di Indonesia?			

				10. Adakah jaminan hukum untuk seorang dokter yang membantu suntik mati atau Euthanasia terhadap seorang pasien?			
				11. Perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Euthanasia?			
				12. Bentuk Euthanasia seperti apa yang sering terjadi dan kita jumpai di masyarakat Indonesia dan apakah hal tersebut dapat ditindak lanjuti terhadap oknum yang secara tidak langsung telah melakukan tindakan Euthanasia?			
				13. Adakah dampak yang ditimbulkan dari Euthanasia tersebut terhadap masyarakat Indonesia?			
77	Sudirman Samosir	2011-41-157	1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	1. Bagaimanakah peran Whistleblower dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia?		Ditolak	
				2. Bagaimanakah jenis perlindungan yang diberikan kepada Whistleblower dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia?			
			2. Tindak Pidana Terhadap Manipulasi dan Pemalsuan Data Pengajuan Kredit Mobil	1. Apa akibat dari manipulasi dan pemalsuan data kredit?	I Gede Hartadi	Diterima	Harus Ada Kasus
				2. Bagaimana cara meminimalisir tindakan manipulasi dan pemalsuan data kredit mobil?			
78	Diaz Tresno Dwi Anggoro	2010-41-107	Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Atas Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI	1. Apakah tindakan-tindakan yang termasuk dalam penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan?		Ditolak	Judul Bersifat Umum
				2. Bagaimanakah prosedur dan sanksi yang diterapkan bagi anggota POLRI yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang?			
79	Bayu Aji Prabowo	2010-41-161	1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Masalah Aborsi di Jakarta	1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan pengguguran kandungan (aborsi)?			
				2. Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan keguguran kandungan (aborsi) di Jakarta?			
			2. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Narapidana Melarikan Diri	1. Upaya apa yang dilakukan LAPAS dalam mencegah narapidana melarikan diri?	Agus Pribadiono	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul dan Permasalahan

				2. Kendala apa saja yang dihadapi LAPAS dalam mencegah narapidana melarikan diri?			
80	Nuryanto	2008-41-146	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kasus Putusan No. 45/Pid.B/2012/PN.MSH)	1. Sejauh mana sebuah postingan di media sosial facebook menjadi sebuah kasus pencemaran nama baik?	Agus Pribadiono	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul dan Permasalahan
				2. Sejauh mana undang-undang mengatur tentang pencemaran nama baik di media sosial?			
81	Kethy Tipani Fadil	2011-41-055	1. Pengelolaan Sampah yang Tidak Efektif di Pasar Kotabumi Kabupaten Tangerang	1. Bagaimanakah cara pengelolaan sampah agar tidak menutupi sebagian jalan raya?			
				2. Bagaimanakah kendala penanganan pembuangan sampah di Pasar Kotabumi Kabupaten Tangerang?		Ditolak	
				3. Bagaimanakah peran masyarakat mengatasi tidak efektifnya pengelolaan sampah di Pasar Kotabumi?			
			2. Pengelolaan Limbah B3 Medis Di Rumah Sakit Sari Asih Sangiang Periuk Tangerang	1. Apakah Rumah Sakit di Sari Asih Sangiang Periuk Tangerang sudah maksimal dalam Pengelolaan limbah yang telah ditetapkan oleh KepMenKes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit?	Zulfikar Judge	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Bagaimanakah dampak limbah Rumah Sakit Sari Asih Sangiang terhadap lingkungan yang berada di sekitarnya?			
				3. Bagaimanakah peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup?			
			3. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum (Studi Kasus Melemahnya Pelayanan Bus Transjakarta)	1. Bagaimanakah kendala layanan Bus Transjakarta yang tidak sesuai dengan hak konsumen?		-	
				2. Bagaimanakah tanggungjawab dari pihak Bus Transjakarta dengan pelayanan yang mulai melemah terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 52 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Transjakarta Busway?			
				3. Diantara kelemahan dalam tingkat pelayanan, ketepatan waktu, kondisi sarana, dan prasarana/fasilitas. Manakah yang perlu mendapat prioritas perbaikan?			

82	Putri Addina	2011-41-111	1. Efektifitas Pasal 40 PERDA DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum	1. Bagaimanakah pengaturan larangan mengemis menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta No 8 Tahun 2007?	Fokky Fuad	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul (Kajian Empiris)
				2. Bagaimanakah perkembangan pengemis yang ada di wilayah DKI Jakarta setelah Pasal 40 Perda DKI Jakarta 8/2007 lahir?			
			2. Tinjauan Yuridis Hak Asasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen (Studi Putusan 82/PUU-XII/2014)	1. Bagaimanakah peraturan keterwakilan perempuan di parlemen menurut Undang-undang No 17 Tahun 2014?		-	
				2. Bagaimana dampak implementasi putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dengan No. 82/PUU-XII/2014 terhadap keterwakilan perempuan di parlemen?			
83	Elsa Sagala	2011-41-122	1. Tinjauan Yuridis Pasal 335 Ayat 1 KUHP Tentang Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PUU-XI-2013)	1. Bagaimanakah pengertian perbuatan tidak menyenangkan pada Pasal 335 Ayat 1 KUHP?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji
				2. Bagaimanakah dampak yang terjadi terhadap Putusan Nomor 1/PUU-XI-2013 dalam lingkup masyarakat?			
				3. Bagaimanakah seharusnya penerapan atau kepastian hukum terhadap Pasal 335 Ayat 1 KUHP?			
			2. Tinjauan Yuridis Putusan Sela Dalam Pengujian Undang-undang (Analisa Studi Kasus No. 133/PUU-VII/2009)	1. Bagaimanakah hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya mengeluarkan putusan sela?	Achmad Edi Subianto	Diterima	Konsultasi dengan Pembimbing mengenai Judul
				2. Bagaimanakah kekuatan hukum pada putusan sela apabila putusan itu lahir dari Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU?			
84	Nurul Aripin	2011-41-017	1. Pelaksanaan Sistem Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (Studi di Kota Tangerang Prov. Banten)	1. Bagaimanakah upaya pemerintah kota Tangerang dalam mewujudkan pelaksanaan sistem kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengelolaan pembangunan berkelanjutan dan pengawasan terhadap badan lingkungan hidup?		Ditolak	Sudah Pernah Dikaji

